

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Barang dan Jasa dengan *Budget Ratcheting* sebagai Variabel Moderating

Mariani^{1*}, Vita Fitria Sari²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: marianimaria69@gmail.com

Abstract

This study aims to (a) determine the effect of Regional Original Income on goods and services expenditure (b) determine the Ratcheting budget in influencing the relationship of Regional Original Income with Goods and Services Expenditure. The population in this study is the APBD and LRA of the Regency/City Government of West Sumatra Province using the 2016-2019 time series obtained from djpk.kemenkeu.go.id. The data analysis technique used in this research is multiple regression analysis. From the results of this study, the value of t arithmetic $< t$ table is $0.689 > 1.666$ and a significant value of $0.448 > 0.05$, it can be explained that Regional Original Income does not affect the expenditure of goods and services. Then the test results on Budget Ratcheting decreased in Adjusted R Square from 42.4% in the first regression to 41.3% in the second regression. So it can be said that Budget Ratcheting weakens the relationship between Local Revenue and Expenditure on Goods and Services.

Keywords: *Locally-Generated Revenue; Budget Ratcheting; Goods and Services Expenditure.*

How to cite (APA 6th style)

Mariani & Sari, V.F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Barang dan Jasa dengan *Budget Ratcheting* sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (2), 248-260.

PENDAHULUAN

Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya otonomi daerah yang diselenggarakan melalui prinsip desentralisasi yakni pemerintah daerah diberi kebebasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pemberian otonomi daerah yang menuntut setiap pemda untuk lebih mandiri dan juga kreatif mencari sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan secara aktif, selain itu pemerintah daerah juga dituntut mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Otonomi daerah menurut UU Nomor. 32 Tahun 2004 ialah kewewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur serta mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya hal tersebut pemerintah daerah harus melakukan penyusunan anggaran dengan sebaik mungkin dalam menjalankan kegiatan operasional serta pengelolaan terhadap sumber daya keuangan yang mereka miliki.

Penyusunan anggaran adalah suatu proses pembuatan keputusan perencanaan kerja untuk jangka waktu dalam satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan juga satuan kuantitatif yang lain (Basri, 2013). Seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan pada sistem

penganggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Perkembangan yang terjadi didalam sistem penganggaran sektor publik telah diatur oleh undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memberikan penjelasan bahwasannya rencana kerja dan anggaran disusun didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang dicapai. Sistem penganggaran yang diterapkan di Indonesia pada saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada penyerapan anggaran (input) saja, akan tetapi sudah didasarkan pada hasil kinerja yaitu output dan outcome dari penggunaan anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya.

Berdasarkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, terdapat tiga jenis belanja daerah yang mencakup belanja operasi, belanja modal serta belanja tak terduga. Dalam belanja operasi terdapat belanja barang dan jasa yang merupakan belanja yang rentan terhadap penyimpangan, karena barang yang diperoleh mudah untuk dipindahtangankan dan pertanggungjawabannya mudah dilakukan. Perubahan anggaran belanja barang dan jasa bersifat strategis dan penting karena menjadi alternatif untuk menghabiskan anggaran, sementara perubahan belanja modal harus dibatasi karena waktu yang tersisa sangat terbatas. Belanja barang dan jasa memiliki peranan yang sangat penting guna peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak hanya berfokus pada pembangunan atau investasi tanpa diiringi kenaikan publik untuk masyarakat. Untuk membentuk daerah serta meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah menggunakan PAD menjadi sumber pembiayaan. Pendapatan asli daerah yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang terdapat pada daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Pengelolaan sumber PAD oleh Pemerintah Daerah yang semakin baik akan menjamin ketersediaan sumber pendanaan Belanja Daerah yang dapat digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah

Besaran alokasi anggaran yang ditentukan untuk periode berikutnya biasanya dilakukan dengan melihat kinerja anggaran yang dijadikan sebagai basis penilaian prestasi manajemen. Penentuan anggaran pada periode berikutnya ditentukan berdasarkan penggunaan anggaran yang menggambarkan konteks yang menandakan inkrementalisme atas anggaran. Inkrementalisme disini mempunyai asosiasi negatif apabila pada anggaran yang ada pada periode sebelumnya memiliki bias. Dimana hal tersebut disebabkan karena adanya perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran yang berbentuk penciptaan senjangan (*slak*) anggaran dan *ratchet Budgeteeting*. Adanya hal tersebut telah menyebabkan adanya penurunan kapasitas terhadap kinerja, sehingga menyebabkan kesulitan terhadap pengukuran tingkat kinerja riil manajemen. Selain itu hal tersebut juga mengakibatkan anggaran yang ada akan menjadi kaku sehingga mengakibatkan adanya ketidakefisienan dalam pertumbuhan anggaran (Sari et al., 2020). Nurhayati (2018) dalam memaparkan bahwa terdapat adanya hubungan hubungan positif antara varians anggaran periode berjalan dengan anggaran periode selanjutnya. Penggunaan dalam varians ini, digunakan sebagai dasar dalam penetapan target selanjutnya yang disebut *Budget Ratcheting*. *Budget Ratcheting* menjelaskan bahwa dalam peningkatan anggaran pendapatan periode selanjutnya cenderung akan lebih responsif pada varian anggaran pendapatan periode berjalan dibandingkan penurunan pendapatan pada periode selanjutnya sebagai berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran periode berjalan.

Safitri dan sari (2020) menyatakan bahwa, *budget Ratcheting* terjadi sebagai bentuk dari adanya asimetri informasi, di mana antara *agent* dan *principal* mendapatkan ketidakseimbangan informasi. *Ratcheting* dalam penganggaran terjadi disebabkan adanya kecenderungan didalam pembuatan perencanaan anggaran guna menentukan tujuan di masa depan dengan menggunakan kinerja saat ini (Nurhayati, 2017). Hal ini memiliki makna

bahwa pada dasarnya budget ratcheting merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki dan merevisi pencapaian target untuk memperoleh gambaran kinerja di masa lalu. *Budget ratcheting* juga disebut sebagai sebuah kecenderungan dalam pembuatan perencanaan anggaran guna menentukan tujuan dimasa depan dengan menggunakan kinerja saat ini.

Andrian dan Sari, (2020) mengatakan bahwa *Budget Ratcheting* dalam organisasi sektor publik penting untuk dikaji karena beberapa hal; (1) *Budget Ratcheting* dalam proses penyusunan anggaran PemDa cenderung terdapat perilaku bias pada penyusunan anggaran yang dapat mempengaruhi anggaran tersebut dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Sebagai akibatnya dari kondisi tersebut pertumbuhan dari anggaran yang tidak efisien dan juga akan merugikan kepentingan publik. (2) *Budget Ratcheting* akan memperlihatkan bahwa anggaran pada periode selanjutnya mengandung *incrementalism* yang tidak selaras dengan tujuan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam upaya meningkatkan akurasi tahapan perencanaan dan memperkuat aspek akuntabilitas kinerja pada siklus penganggaran.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang menunjukkan pencapaian yang baik. APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan dilakukannya berbagai pembangunan baik dalam bentuk sektor pariwisata daerah dan sektor publik lainnya (Annisa, 2020). Pada sisi pendapatan daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8% per tahun selama kurun waktu 2016-2019 begitu juga dengan sisi pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan 11%. Untuk Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar Rp3,646,986,353,089 menjadi Rp4,426,443,171,491 pada tahun 2019. Perkembangan yang terjadi dalam komponen pendapatan daerah pada APBD Provinsi Sumatera Barat menandakan bahwa pada anggaran pemerintah disisi pendapatan cenderung *underforecast*.

Belanja Barang dan Jasa pada Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan rata-rata 12 % per tahun selama kurun waktu 2016-2019. pada tahun 2016 belanja barang dan jasa sebesar Rp5.101.869,389,938 menjadi Rp7.062.635.039.807 pada tahun 2019. Namun realisasi belanja barang dan jasa mengalami fluktuasi dari anggaran yang direncanakan. Dimana dalam tahun 2016&2017 nilai realisasi untuk anggaran Belanja Barang dan Jasa mencapai 94,55% dan 105,18% sementara pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 98,64% dan 96,43%, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 dan 2019 yang berjalan tidak optimal. Situasi ini akan mengindikasikan bahwa capaian realisasi anggaran memerlukan peningkatan dari sisi perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ruang lingkup pada APBD tersebut yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja barang dan jasa dan *budget ratcheting* mempengaruhi hubungan tersebut.

Berdasarkan pada fenomena dan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja barang dan jasa melalui budget ratcheting sebagai variabel moderasi. Sehingga judul penelitian yang diangkat “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Barang dan Jasa dengan *Budget Ratcheting* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019).

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) memaparkan tentang adanya terjadi konflik antara pemilik selaku *principal* dan manajemen selaku *agent*. (Andrian dan Sari, 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling

(1976), merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer), yang mana *principal* mendelegasikan wewenangnya kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pada sektor publik, hubungan keagenan dapat terjadi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang melibatkan antara legislatif dan eksekutif (Andrean dan Sari, 2020) Legislatif (*principal*) selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam kapasitasnya mendelegasikan wewenang pemerintahan kepada eksekutif (*agent*) selaku Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan baru yang diperuntukan demi kepentingan rakyat.

Teori keagenan tidak hanya terjadi antara hubungan legislatif dengan eksekutif, tetapi juga terjadi antara legislatif dengan masyarakat (Rizqiyati et al., 2019). Masyarakat selaku *principal* mengharapkan keputusan-keputusan yang diambil oleh legislatif selaku *agent* dapat memenuhi keinginan masyarakat secara umum. Dalam konteks penyusunan anggaran, legislatif selaku *agent* bertanggung jawab atas pengusulan anggaran kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, hubungan antara masyarakat dengan legislatif sering terjadi masalah keagenan (Andrean dan Sari, 2020). Legislatif sering mengabaikan kepentingan masyarakat dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya atau kepentingan golongan tertentu di saat pembuatan keputusan terkait pelayanan publik. Kenyataan ini semakin menjadi berlarut-larut ketika masyarakat tidak memiliki informasi yang dapat dijadikan sebagai alat pengawasan kinerja legislatif. Untuk mengurangi permasalahan keagenan, baik antara eksekutif dengan legislatif dan antara masyarakat dengan pihak legislatif, maka pihak Pemerintah Daerah harus berupaya menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara akuntabilita (Safitri & Sari, 2020).

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan suatu pengeluaran atau pembelian atas sejumlah barang dan jasa yang habis pakai sebagai suatu pengadaan untuk diserahkan atau dijual guna memenuhi kebutuhan belanja masyarakat (Iswahyudin, 2016). Sedangkan (Faisal et al., 2017) menjelaskan “Belanja Barang dan Jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa untuk pelayanan publik”. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Barang dan Jasa merupakan salah satu program Pemerintah Daerah yang diperuntukan untuk pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat dalam bentuk hibah atau bantuan sosial guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang utama dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah yang nantinya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat (Nasir, 2019). (Syofya & Gustomi, 2020) memaparkan bahwa PAD sangat berperan penting dalam penentuan arah kebijakan Pemerintah Daerah dan kemampuannya untuk membiayai aktivitas pemerintahan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dalam bentuk Belanja Daerah atau kas keluarnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa PAD memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah dan sebagai penunjang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah atau Belanja Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. Semakin besar jumlah pada PAD yang diperoleh oleh Pemda maka akan sebanding dengan laju pembangunan di pemerintahan daerah tersebut (Nasir, 2019).

Budget Ratcheting

Budget Ratcheting merupakan penentuan target dalam penyusunan anggaran dengan menggunakan informasi capaian kinerja anggaran tahun sebelumnya untuk pencapaian target tahun-tahun berikutnya yang bersifat menguntungkan (*favorable*). Susanto (2018) menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan anggaran dari tahun ke tahun pada organisasi pemerintahan sebagai akibat adanya *ratcheting* hanya sekedar mengikuti norma klasik, yakni realisasi anggaran dari tahun sebelumnya ditambah dengan tingkat pertumbuhan tertentu yang diharapkan di tahun selanjutnya. *Budget ratcheting* pada penyusunan anggaran muncul dalam bentuk sikap/perilaku oportunistik eksekutif dengan memodifikasi realisasi anggaran tahun berjalan menjelang akhir tahun anggaran sehingga menunjukkan kinerja anggaran yang lebih baik

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Barang dan Jasa

Pencapaian target atau anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemungkinan dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan daerah dan pelayanan publik. (Susanto, 2018) bahwa peningkatan target pendapatan pada tingkat tertentu dari target pendapatan tahun sebelumnya memberi legitimasi bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja atau pengeluaran pada tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah yang memiliki PAD yang tinggi maka pengeluaran-pengeluaran untuk alokasi Belanja Daerah juga semakin tinggi..

Andrean dan Sari,(2020) memaparkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa, ketika PAD mengalami peningkatan maka Belanja Daerah juga akan mengalami peningkatan termasuk belanja barang dan jasa. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Barang dan Jasa. Maka untuk hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja barang dan jasa pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.

***Budget Ratcheting* Mempengaruhi Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Barang dan Jasa**

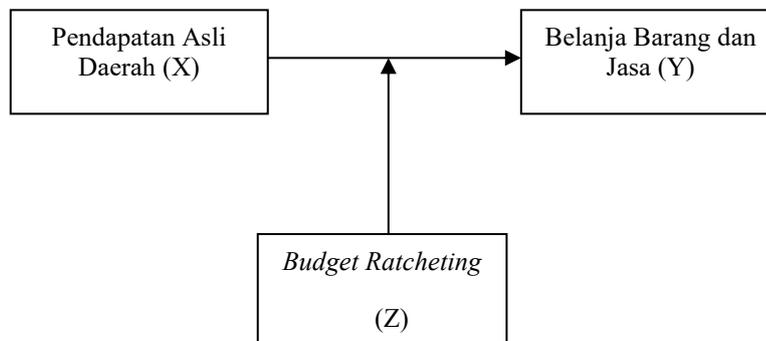
Budget ratcheting dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki dan merevisi pencapaian target dalam memperoleh gambaran kinerja di masa lalu. *Budget ratcheting* dalam penyusunan anggaran muncul dalam bentuk perilaku oportunistik eksekutif yang mana dengan mengubah dari realisasi anggaran tahun berjalan menjelang datangnya akhir tahun tersebut. Lee & Plummer,2007) menjelaskan bahwa pada politik ekonomi di pemerintah daerah mengaitkan birokrat dan tampak dari upaya memaksimalkan anggaran, pemerintah daerah pada biasanya dengan memanfaatkan kekuatan monopoli yang mereka punya.

Dalam penganggaran daerah terdapat masalah keagenan, dimana akan terjadi pada saat pengusul anggaran dan yang menyetujui usulan anggaran tersebut mempunyai kepentingan pribadi (*self-interest*) yang kemudian akan diakomodir di dalam anggaran. Sehingga, antara pengusul anggaran dan yang menyetujuinya akan menjadi aktor *agency* yang akan terus menerus melakukan pemaksimalan anggaran. Dengan demikian, hubungan antara anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah periode sebelumnya akan mengalami kenaikan anggaran pada periode berikutnya. Dengan begitu dapat dijelaskan bahwa terdapat bias dalam penentuan target anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam penyusunan anggaran akan menimbulkan respon yang berbeda antara *agent* dan *principal*, sehingga terjadi *asymmetric ratchet* dalam proses

penentuan target kerja di tahun berikutnya. Sehingga untuk hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu:

H2 : *Budget ratcheting* memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap Belanja Barang dan Jasa pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2016-2019

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis dan Objek Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Studi kausalitas ini diartikan sebagai studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari suatu permasalahan (Sekaran, 2006). Penelitian kausatif merupakan penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat yang terjadi antara dua variabel atau lebih, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja barang dan jasa dengan *budget ratcheting* sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja barang dan jasa.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini menggunakan 19 pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten pada Provinsi Sumatera Barat berjumlah 12 kabupaten, sedangkan Pemerintah Kota berjumlah 7 kota. Populasi yang diteliti termasuk kecil, maka pengambilan sampel tidak dilakukan karena jika dilakukan pengambilan sampel, maka tidak dapat mewakili populasi dan nilai-nilai yang dihitung berdasarkan total sampling sebagai perkiraan dari nilai-nilai populasi (Cooper & Schinder; 114)..

Jenis , Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu berupa angka yang bersifat objektif. Data kuantitatif terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Barang dan Jasa. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti atau dengan menggunakan perantara dalam bentuk dokumen, arsip ataupun dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang

digunakan adalah data yang diperoleh dari LKPD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2019 yang diperoleh dari djpk.kemenkeu.go.id. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder sesuai dengan alasan penelitian. Dengan adanya teknik dokumentasi ini diharapkan akan menghasilkan data yang akurat dan meminimalisir bias.

Defenisi Variabel dan Pengukurannya Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa. Belanja Barang dan Jasa adalah suatu pengeluaran atau pembelian atas sejumlah barang dan jasa yang habis pakai sebagai suatu pengadaan untuk diserahkan atau dijual guna memenuhi kebutuhan belanja masyarakat (Iswahyudin, 2016). Pengukuran dalam Belanja Barang dan Jasa akan dapat dilihat dari seluruh total Belanja Barang dan Jasa untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang bersumber dari data Laporan Realisasi Anggaran. Untuk pengukuran Belanja Barang dan Jasa yang digunakan pada penelitian iniyaitu:

$$\text{Belanja Barang dan Jasa} = \text{Belanja Barang} + \text{Jasa} + \text{Sewa Sarana} + \dots n$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (X) adalah sumber pendapatan daerah yang utama dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah yang nantinya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat (Nasir, 2019). Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan skala nominal dengan satuan Rupiah dan dapat diketahui dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016 – 2019.

Pada penelitian ini, rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

$$\text{PAD} = \text{Pendapatan Pajak Daerah} + \text{Retribusi} + \text{Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

Budget Ratcheting

Budget Ratcheting merupakan penentuan target dalam penyusunan anggaran dengan menggunakan informasi capaian kinerja anggaran tahun sebelumnya untuk pencapaian target tahun-tahun berikutnya yang bersifat menguntungkan (Abdullah & Junita, 2016). Pengukuran *Budget Ratcheting* dalam penelitian ini dengan menggunakan model dari Aranda (2010) pada Abdullah dan Junita (2016) seperti berikut:

$$\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1} = \sigma + \beta(\text{PADR}_{t-1} - \text{PAD}_{t-1}) + \varepsilon$$

PAD_t = Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun t,

PAD_{t-1} = anggaran PAD tahun t-1

σ = konstanta

B = koefisien regresi

PADR_{t-1} = realisasi PAD tahun t-1

ε = error terms

$\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}$ sebagai pengukuran pada kenaikan anggaran Pendapatan Asli Daerah pada tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun lalu, sebagai cerminan adanya *Ratcheting* dalam penentuan target PAD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis pada statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data-data dalam Penelitian.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| Pad | 76 | 10.09 | 11.74 | 10.9346 | .27320 |
| Bbj | 76 | 11.11 | 11.84 | 11.3737 | .14327 |
| Br | 76 | .00 | 2.09 | 1.7079 | .21361 |
| Valid N (listwise) | 76 | | | | |

Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki rentang nilai mulai dari 10,09 sampai dengan 11,74. PAD memiliki nilai yang rata-rata 10.9346 dan nilai standar deviasi sebesar 0,27320. Variabel Belanja Barang dan memiliki rentang nilai dari 11,11 sampai dengan 11,84. Belanja barang dan jasa memiliki nilai rata-rata sebesar 11,3737 dan juga memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,14327. Sedangkan untuk variabel *Budget Ratcheting* yang dihitung menggunakan model Aranda (2010) memiliki rentang nilai mulai dari 0.00 sampai dengan 2,09 dan memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 1,7079 serta memiliki nilai standar deviasi sebesar 0.21361

Analisis Regresi

Pengujian regresi dilakukan setelah melewati uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Autokorelasi.

Tabel 2
Hasil Estimasi Analisis Regresi Sederhana

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 7.607 | .506 | | 15.021 | .000 |
| PAD | .344 | .046 | .657 | 7.440 | .000 |

a. Dependent Variable: BBJ

Dari Tabel 2 apabila dituliskan kedalam persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$BBJ = \alpha + b_1PAD + e$$

$$BBJ = 7,607 + 0,444 PAD$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien konstanta adalah nilai 7,607 sedangkan pada nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 0,344 yang menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif sebesar 0,344 terhadap belanja barang dan jasa, artinya semakin meningkat pendapatan asli daerah maka juga akan meningkatkan belanja barang dan jasa pada pemerintahan daerah tersebut.

Moderating Regression Analysis

Tabel 3
Hasil Estimasi Moderating Regression Analysis

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|----------------------|------|
| | B | Std. Error | Coefficients Beta | |
| 1 (Constant) | 6.905 | 6.250 | | .273 |
| PAD | .402 | .576 | .766 | .488 |
| BR | .402 | 3.562 | .600 | .910 |
| PAD*BR | -.033 | .328 | -.540 | .921 |

Dari output Tabel 3, apabila ditulis dalam bentuk dari persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$BBJ = a + b_1PAD + b_2BR + b_3PAD \times BR + e$$

$$BBJ = 6,095 + 0,344PAD + 0,442 BR - 0,033PAD \times BR + e$$

Berdasarkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai konstanta 6.905, hal ini dapat diartikan, ketika nilai variabel bebas PAD konstan, maka besar nilai variabel terikat Belanja Barang dan Jasa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat adalah 6.905. Sedangkan nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif sebesar 0,344 terhadap belanja barang dan jasa, artinya semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah, maka dapat meningkatkan Belanja Barang dan Jasa. Apabila ditambahkan dengan *Budget Ratcheting* sebagai variabel moderasi maka akan menghasilkan nilai sebesar 0,033.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .661 ^a | .436 | .413 | .10977 |

a. Predictors: (Constant), pad*br, pad, br
b. Dependent Variable: bbj

Berdasarkan output pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,424 atau 42,4%. Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan dari variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya adalah sebesar 0,424 atau 42,4% berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sedangkan sisanya sebesar 57,6% dijelaskan oleh variabel lain. Sedangkan pada tabel 8 nilai Adjusted R Square mengalami peningkatan menjadi 0,413 atau 41,3%. Dari hasil tersebut menjelaskan bahwa 41,3% belanja barang dan jasa dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah dan Budget Ratcheting sebagai variabel moderasi yang memperkuat dalam memoderasi pendapatan asli daerah terhadap belanja barang dan jasa.

Uji F

Tabel 5
Hasil uji F

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | .672 | 3 | .224 | 18.588 | .000 ^b |
| | Residual | .868 | 72 | .012 | | |
| | Total | 1.540 | 75 | | | |

a. Dependent Variable: bbj
b. Predictors: (Constant), pad*br, pad, br

Dari perhitungan dan output tabel diatas diketahui bahwa nilai F_{hitung} 18.588 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,005$ dan nilai F_{hitung} $18.588 > F_{tabel}$ 3,12. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan untuk penelitian ini dalam menguji pendapatan asli daerah adalah model yang fit. Dari hasil persamaan regresi tersebut bhawa dapat dinyatakan signifikan yang artinya terdapat pengaruh signifikanantara pendapatan asli daerah dan *budget ratcheting* terhadap belanja barang dan jasa.

Uji T

Tabel 6
Hasil uji T

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 6.905 | 6.250 | | 1.105 | .273 |
| PAD | .402 | .576 | .766 | .698 | .488 |
| BR | .402 | 3.562 | .600 | .113 | .910 |
| PAD*BR | -.033 | .328 | -.540 | -.100 | .921 |

Berdasarkan analisis regresi pada Tabel 6, bahwa pendapatan asli daerah memperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,698 > 1,666$. Berdasarkan tabel di atas untuk variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai Sig. sebesar 0,448. Hal ini dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja barang dan jasa, dikarenakan nilai 0,448 lebih besar dari 0,05 (alfa).

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Barang dan Jasa

Berdasarkan hasil olah data penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel regresi secara parsial yang menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel PAD terhadap belanja barang dan jasa, dimana signifikansi sebesar 0,488 yang diperoleh lebih besar dari nilai toleransi kesalahan $\alpha=0,05$. Sedangkan hasil uji t yaitu nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,698 > 1,666$.

Hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Syofya dan Gustomi (2020) yang memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja barang dan jasa pada pemerintah kabupaten Kerinci. Hasil uji statistik memperoleh pengaruh sebesar 0,7560 yang memiliki arah positif terhadap belanja barang dan jasa yang artinya apabila pendapatan asli daerah mengalami peningkatan maka belanja barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan. Penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian Haryanto (2013) memberikan hasil bahwa pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh terhadap belanja barang dan jasa.

Budget Ratcheting dalam mempengaruhi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Barang dan Jasa

Hasil penelitian mengenai pengaruh *budget ratcheting* yang berperan sebagai variabel moderasi dapat dilihat pada tabel Anova yang memperlihatkan bahwa nilai *Adjusted R Square* pada regresi linier sederhana sebesar 0,424 atau 42,4% sedangkan nilai *Adjusted R Square* pada regresi linier berganda setelah dimasukkan *budget ratcheting* sebagai variabel moderasi menurun menjadi 0,413 atau 41,3%. Artinya, terjadi penurunan nilai *Adjusted R Square* yang terjadi pada hubungan kausalitas ini. Sedangkan nilai koefisien untuk variabel pemoderasi yaitu PAD*BR sebesar 0,033 artinya, *budget ratcheting* mempunyai efek moderasi terhadap hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja barang dan jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa *budget ratcheting* memperlemah hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja barang dan jasa.

Penelitian ini memperoleh hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Adrean dan Sari (2020) yaitu memberikan hasil regresi pertama yaitu sebesar 0,374 atau 37,4% dan angka R Square mengalami penurunan menjadi 0,361 atau 36,1%. Maka hasil tersebut juga memberikan kesimpulan bahwa hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah diperlemah oleh *budget ratcheting*.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pengujian terhadap 19 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi sampel sebanyak 76 dari tahun 2016-2019 dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Barang dan Jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu yaitu $0,698 > 1,666$ dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,488 yang berarti lebih besar dari nilai toleransi sebesar 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja barang dan jasa
- b. *Budget Ratcheting* merupakan variabel moderasi yang berfungsi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja barang dan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *budget ratcheting* berpengaruh dan mampu memperlemah hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam penurunan nilai *Adjusted R Square* dimana pada regresi sederhana sebesar 42,4% sedangkan nilai *Adjusted R Square* pada regresi linier berganda setelah dimasukkan *budget ratcheting* sebagai variabel moderasi (MRA) nilai *Adjusted R Square* menurun menjadi atau 41,3%.

Keterbatasan

Meskipun peneliti sudah berusaha merancang serta membuatkan penelitian sedemikian rupa, tetapi masih ada beberapa keterbatasan pada penelitian yaitu: peneliti hanya

meneliti secara umum untuk pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, sehingga untuk lebih menyampaikan hasil yang baik dilakukan penelitian SKPD pemda tersebut. Pengaruh dari variabel yang sudah ditentukan peneliti mempunyai tingkatan yang kecil sehingga hasil kurang memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy, 2016, Bukti Empiris Tentang Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Aceh. *MODUS, Vol. 28 (2): 185-201, ISSN 0852-1875*
- Adyatma, Erdi dan Oktaviani, Rahmawati Meita., 2015, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi; *ISSN 1979 – 4878, Volume 4 Nomer 2 November 2015.*,
- Agus Budi Santosa dan Mohamad Ainur Rofiq. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007 – 2010). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2013, Hal. 184 – 198 Vol. 20, No. 2 ISSN: 1412-3126. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang.*
- Andrean, Aldy dan Vita Fitria Sari, 2020, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah dan Budget Ratcheting Sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2, No. 1, Seri A, Hal. 1984-2000, ISSN: 2656-3649*
- Aranda, C., Arellano, J., & Davila, A. 2010. Ratcheting and the role of relative target setting. *the accounting review* , 1197-1226
- Arbie, Gugus Wandira. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal. 2 (1) 2013: p.44-51*
- Fauzan Misra, 2020, Budget Ratcheting in Governmental Budgeting: An Empirical Investigation, *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Volume 6, Number 1, e-ISSN 2549-452X, p-ISSN 2460-3937*
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*, Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul . 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Jaya, I Putu N.P.K; Dwirandra, A.A.N.B. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014):79-92.*
- Juniawan, Made Ari dan Ni Putu Santi Suryantini, 2018, Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bali, *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, page 1255-1281, ISSN: 2302-8912*
- Kuncoro Adhi, Abdul Hakim dan Mochamad Makmur, 2019, Proses Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, *Jurnal Profit, Volume 13, No 1, https://profit.ub.ac.id.*
- Lee, T., & Plummer, E. 2007. Budget Adjustments in Response to Spending Variances: Evidence of Ratcheting of Local Government Expenditures. *Journal of Management Accounting Research* , 137-167.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.

- Nurin, Hidayati, 2016, Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, *Ekonomi UMS*, hal. 13-19
- Safitri, Annisa Ayu dan Vita Fitria Sari, 2020, Efek Budget Ratcheting Pada Anggaran Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018), *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2, No. 3, Seri A, Hal 2992-3011, ISSN: 2656-3649
- Saraswati, Ida Ayu dan Ramantha, I Wayan, 2018, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 24.1. page: 662-686, ISSN: 2302-8556
- Sugiarti dan Supadmi, 2014. Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7(2): 477-495, ISSN: 2302-8556
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhanda, 2007, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima Sisi
- Susanto, Anindyo Aji & Abdul Halim, 2016, Efek Ratchet pada Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Publik*, Volume 1, nomor 1, hal 88-96
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- Vinna Novita Sari, Suhairi, dan Nini Syofriyeni, 2020, Efek Ratchet Terhadap Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kota Se Sumatera, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 20 nomor 1, pp 183-186
- Weitzman, M. L. (1980). The Ratchet Principle and Performance Incentives. *The Bell Journal of Economics* 11: 302-308. Web: <http://scholar.harvard.edu/files/weitzman/files/ratchetprincipleperformanceincentives.pdf> (20/1/15)
- Yani Rizal dan Erpita, 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 3, No. 1
- Yunistin Ndede, Jullie J., Sondakh, dan Winston Pontoh. 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No. 03.